

LAMPUNG SAI

VOLUME 2 2023

Gerbang Transisi

**BERGERAK BANGKITKAN KESADARAN
INSPIRASI DAN MOTIVASI**



**Penguatan
Inspektur Jenderal**

Siap Berikan Layanan Terbaik
Menuju Good Governance

**Kunjungan Kerja
Komisi III DPR RI**

Restorative Justice Solusi
Over Kapasitas pada Lapas dan Rutan

**Gelar Rakor
Dilkumjarkpol**

Optimalisasi Penanganan Overstaying
dan Overload Basan Baran pada
UPT Pemasyarakatan



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**

**# bangga
melayani
bangsa**

KAMI ASN KEMENKUMHAM
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI

➤ Berorientasi Pelayanan

1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Ramah, Cekatan, Solutif dan dapat Diandalkan.
3. Melakukan perbaikan tiada henti.

➤ Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

➤ Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
2. Membantu orang lain belajar.
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

➤ Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

➤ Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi & Negara.
3. Menjaga Rahasia jabatan & negara.

➤ Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
2. Terus berinovasi & mengembangkan kreativitas.
3. Bertindak proaktif.

➤ Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
3. Menggerakkan Pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

Dari Redaksi

Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Pada Volume 2 Tahun 2023 ini kami sajikan liputan khusus tentang Penguatan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI melalui kegiatan Gerbang Transisi

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pimpinan Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan selalu kami terima dengan sambutan hangat agar Buletin Lampung Sai semakin baik dan semakin PASTI. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!



Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung | **Pelindung:** Kepala Kantor Wilayah | **Pengarah:** Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian | **Penanggung Jawab:** Kepala Bagian Program dan Humas | **Pemimpin Redaksi:** Kepala Sub Bagian Humas RB & TI | **Tim Redaksi dan Redaktur Foto :** Damba Wiratama, Reza Khairulfitra, Rizqi D. Wardhanik, Nabil An Nafis, Odi Dewangga Y., M. Yusuf, Galang Syaelendra | **Desain Grafis dan Layout:** Nabil An Nafis

Daftar Isi



Liputan Khusus



08

Penguatan Inspektur Jenderal Kemenkumham RI : Gerbang Transisi, Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi.



Liputan Khusus



16

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, Restorative Justice Solusi Over Kapasitas pada Lapas dan Rutan



22

SKD Calon Taruna Poltekip/Poltekim Berlangsung Tertib, Bersih, Transparan, dan Humanis



28

Sukseskan World Surfing League, Kanwil Kemenkumham Lampung & Kanim Kotabumi Buka Layanan Izin Tinggal Keimigrasian On The Spot



34

Workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran



38

Sosialisasi Kebijakan Terkait Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)



Topik Utama

42

Kanwil Kemenkumham Lampung Gelar Rakor Dilkumjakpol, Optimalisasi Penanganan Overstaying Dan Overload Basan Baran pada UPT Pemasarakatan



Sekilas Info



48



Kamu Harus Tahu



50

Mau Nonton Konser di Luar Negeri? Apa saja yang harus disiapkan?

54

Pemegang Paspur Indonesia Bisa Kemana Aja?

56

Kekayaan Intelektual dalam Olahraga Badminton





GERBANG TRANSISI

Bergerak Bangkitkan Kesadaran
Inspirasi dan Motivasi



▲
Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu
saat memberikan penguatan pada Jajaran Kanwil
Kemenkumham Lampung



09/05 

Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM RI, Ir. Razilu M.Si berikan penguatan kepada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung pada hari ini, Selasa (09/05/2023) melalui kegiatan Gerbang Transisi yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah. GERBANG TRANSISI merupakan akronim dari Bergerak, bangkitkan

kesadaran Inspirasi dan Motivasi yang merupakan buah pemikiran original dari seorang anak bangsa terbaik kebanggaan Kemenkumham yang akan mendorong ASN kemenkumham Lampung bekerja semakin Pasti dan Berakhlak sebagaimana nilai yang diagungkan dan digaungkan setiap saat di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.





Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah III, Iwan Santoso; Kepala Kantor Wilayah Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing; Kepala Divisi Administrasi, Dr. M. Ikmal Idrus; Kepala Divisi Pemasarakatan, Dr. Farid Junaedi; Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata, dan 26 Kepala Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa Inisiatif dan program serta gagasan Bapak Irjen dalam konsep GERBANG TRANSISI seumpama oase di padang gurun kepada jajaran kemenkumham Lampung yang sedang melangkah dan berjuang untuk





Jajaran Pimpinan Kemenkumham Berkomitmen untuk menjalankan Resolusi Kemenkumham 2023 yaitu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel

Razilu ➤

Inspektur Jenderal kemenkumham RI





▲ Memberikan ceramah kepada Waga Binaan Pemasarakatan dan Pegawai di Lapas Kotabumi



▲ Meninjau Ruang Pelayanan Terpadu yang telah diresmikan



mendapat kepercayaan dan pengakuan masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang hadir memberikan jawaban dan layanan terbaik menuju Good Governance.

Inspektur Jendral dalam kegiatan ini menyampaikan tujuan dari Gerbang Transisi ini adalah untuk membangkitkan kesadaran serta peran strategis Kemenkumham, menyadarkan bahwa setiap ASN laksana pisau bermata dua, memberikan motivasi untuk berkontribusi secara kreatif, memberikan motivasi tentang pentingnya menjadi pribadi yang utuh, insan kamil, dan insan pengayoman sejati, memberikan beragam inspirasi untuk menjadi insan inovatif dan kreatif, serta dalam jangka panjang untuk menekan dan / mengurangi penyimpangan/ pelanggaran.

◀ Meninjau bimbingan kerja pembuatan kain tapis di Lapas I Bandar Lampung

“Jajaran Pimpinan Kemenkumham Berkomitmen untuk menjalankan Resolusi Kemenkumham 2023 yaitu mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas, dan hasilnya akuntabel.” Ujar Ir. Razilu.

Inspektur Jendral Kemenkumham RI juga menghimbau kepada seluruh jajaran untuk senantiasa memberikan kinerja prima secara berkelanjutan dengan

melaksanakan prioritas penting untuk mencapai hasil, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen serta meningkatkan efektivitas individu untuk membangun Kapabilitas.

Razilu juga menyempatkan untuk memberikan penguatan dan peninjauan langsung kegiatan kerja di beberapa satuan kerja Kanwil Kemenkumham Lampung. •



◀ Meninjau layanan pembuatan paspor di Kanim Kotabumi



◀ Fotoversi usai penandatanganan 10 pesan Ijren Kemenkumham RI



Sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM kita harus memiliki sikap hati seperti bersyukur dan bangga menjadi bagian di Kemenkumham, memikirkan terus menerus untuk memberikan kontribusi (inovasi) yang positif kepada organisasi, dan Jangan menjadi benalu yang dapat mencoreng nama baik organisasi

Razilu ➤

Inspektur Jenderal kemenkumham RI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Atensi

PRESIDEN | **REPUBLIK INDONESIA**

BAPAK

Ir. H. JOKO WIDODO

1. TIDAK BOLEH JUMAWA
2. TIDAK BOLEH PAMER KEKUASAAN
3. TIDAK BOLEH PAMER KEKAYAAN
4. TIDAK BOLEH BERGAYA HIDUP MEWAH
5. WUJUDKAN **"BIROKRASI KEMENKUMHAM YANG MELAYANI"**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**





KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR RI DI PROVINSI LAMPUNG

Restorative Justice Solusi Over Kapasitas pada Lapas dan Rutan

14/04



Jum'at (14/04/2023), bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Komisi III DPR RI lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem). Dalam kunjungannya Komisi III DPR RI disambut oleh Kakanwil Kemenkumham Lampung, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing;

bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, Nanang Sigit Yulianto; Turut Hadir Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham RI, Hantor Situmorang; Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung beserta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi Provinsi Lampung.

Dalam rapat kunjungan kerja ini, Kakanwil Sorta menjelaskan tentang kondisi umum Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam pelaksanaan tugasnya. Dilanjutkan dengan penjelasan jawaban atas pertanyaan Komisi III DPR RI Dalam Rangka Kunjungan Kerja Ke Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum Dan HAM RI Pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2022 – 2023. Salah satu masalah yang dibahas terkait Over kapasitas yang ada Di Lapas dan Rutan.

Disampaikan juga tentang Rencana Strategis dan program yang menjadi skala prioritas serta target PNBP Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan dan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), kondisi jumlah tenaga pengamanan, serta keadaan Lapas dan Rutan yang membutuhkan perhatian. Kanwil Kemenkumham Lampung juga terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan Over.



Kakanwil Sorta memberikan paparan penjelasan kepada anggota Komisi III DPR RI



SIKIP SISTEM KERJA RESES MISI III DPR RI SIDANGAN IV TAHUN 2022-2023



”

Dengan adanya kebijakan-kebijakan baru terutama UU Pemasyarakatan dan juga program Asimilasi merupakan salah satu upaya pengurangan jumlah warga binaan pemasyarakatan dapat terurai. Kanwil Kemenkumham Lampung juga telah melakukan secara berkala pemerataan satuan kerja di Provinsi Lampung.

Sorta Delima Lumban Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung



▲ kunjungan kerja ke Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem)

Dalam Rapat Kerja ini Komisi III DPR RI memberi masukan kepada Kanwil seperti rehabilitasi untuk pengguna narkoba guna mengurangi over kapasitas, penyiapan ruang persidangan online yang memadai pada setiap Lapas maupun Rutan, tetap menerapkan layanan Eazy Passport untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak – pihak terkait guna meningkatkan kinerja pada Lapas, Rutan, dan Kantor Imigrasi.

Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil I, Taufik Basari jelaskan untuk lebih mensosialisasikan rumah restorasi justice kepada masyarakat untuk dapat mengurangi over kapasitas pada lapas maupun rutan. Lebih lanjut pria yang sering disapa Taubas menyampaikan jika perlu adanya distribusi Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada dilapas dan rutan secara berkala agar terjadi pemerataan jumlah hunian.

Menanggapi pernyataan Taubas, Kakanwil Sorta sampaikan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru terutama Undang-Undang Pemasyarakatan dan juga program Asimilasi dalam rangka penanggulangan penyebaran covid merupakan salah satu upaya pengurangan jumlah warga binaan pemasyarakatan dapat terurai. Kanwil Kemenkumham Lampung juga telah melakukan secara berkala pemerataan satuan kerja di Provinsi Lampung. •



◀ Anggota Komisi 3 DPR RI Dapil I, Taufik Basari jelaskan untuk lebih mensosialisasikan rumah restorasi justice kepada masyarakat



▲ Kunjungan kerja Komisi III DPR RI bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung

SKD CATAR POLTEKIP/ POLTEKIM



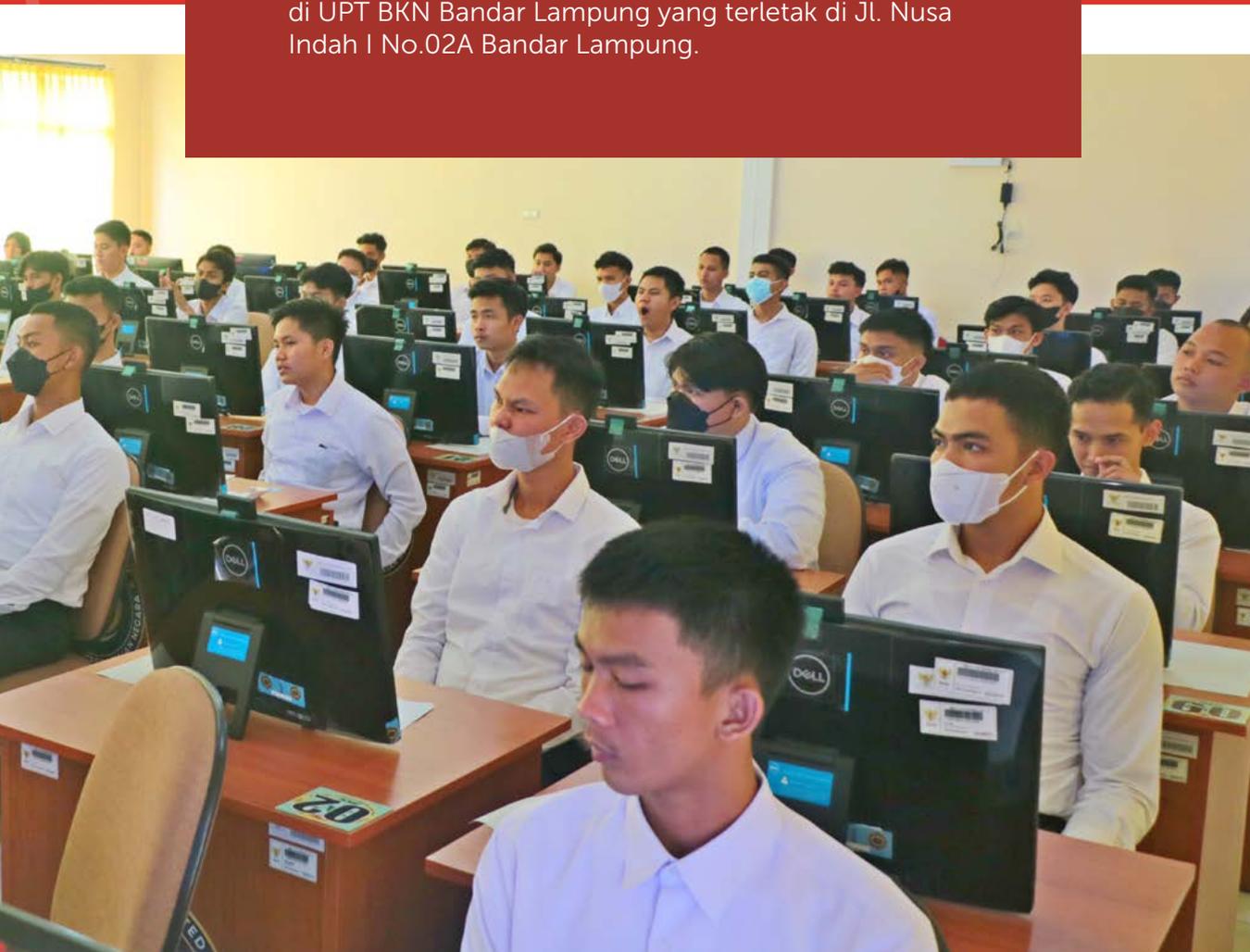
◀ Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus memberikan pengarahan kepada para peserta SKD Catar Poltekip/Poltekim

Berlangsung Tertib, Bersih, Transparan, dan Humanis

17/06



Pada Hari Sabtu 17 Juni 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Bagi calon taruna/taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip). Kegiatan berlangsung di UPT BKN Bandar Lampung yang terletak di Jl. Nusa Indah I No.02A Bandar Lampung.





Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus, hadir dalam acara tersebut. Beliau melakukan tinjauan dan memberikan semangat kepada para peserta yang hadir. Selain itu, Kepala Bagian Umum, Denial Arif, serta seluruh jajaran panitia dari Kantor Wilayah Lampung turut hadir dan menjalankan tugas kepanitiannya hingga memastikan kelancaran pelaksanaan seleksi.

Peserta Seleksi Kompetensi Dasar dengan lokasi tes di Provinsi Lampung diikuti oleh 971 peserta yang terbagi dalam jadwal seleksi pada 17-21 Juni 2023.

Seluruh rangkaian kegiatan seleksi diawasi oleh panitia yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah

Pemeriksaan peserta menggunakan metal detector ▶





”

Formasi penerimaan Poltekim tahun ini sebanyak 300 orang dengan rincian 219 Taruna dan 71 Taruni sedangkan untuk Poltekip tahun ini sebanyak 225 orang dengan rincian 176 Taruna dan 43 Taruni.



▲ Pembukaan segel ruangan Tes SKD disaksikan oleh peserta

Kementerian Hukum dan HAM Lampung, termasuk Rosalia Novriani dan Arief Maulana Nasution yang merupakan perwakilan panitia dari Biro Kepegawaian. Para panitia bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan dengan fair, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sebelum memulai pelaksanaan CAT, Kadivmin memberikan Semangat kepada calon taruna yang akan mengikuti CAT. "Semoga hasilnya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan", Ujar Kadivmin kepada Calon Taruna/Taruni.

Dihari sebelumnya ruangan Seleksi SKD (CAT) telah di lakukan penyegelan guna keamanan

”

Dihari sebelumnya ruangan Seleksi SKD (CAT) telah di lakukan penyegelan guna keamanan dan menghindari tindak kecurangan, dengan disaksikan oleh pihak BKN dan Kemenkumham



▲
Pemeriksaan identitas peserta oleh petugas

dan menghindari tindak kecurangan , dengan disaksikan oleh pihak BKN dan Kemenkumham

Perlu diketahui seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Poltekim dan Poltekip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 tidak dipungut biaya.

Panitia juga menghimbau kepada seluruh peserta seleksi agar selalu update dalam memonitor informasi terbaru, informasi terbaru dapat dilihat di website catar.kemerkumham.go.id maupun di media sosial Kanwil Kemenkumham Lampung.



▲
Kepala Bagian Umum, Denial Arief serahkan berita acara penyelenggaraan SKD Catar Poltekip/Poltekim kepada Kepala UPT BKN Bandar Lampung

SUKSESKAN WSL KRUI PRO



▲ Kepala Divisi Keimigrasian, Teodorus Simarmata dampingi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal meninjau booth layanan izin tinggal keimigrasian

Kanwil Kemenkumham Lampung & Kanim Kotabumi Buka Layanan Izin Tinggal Keimigrasian On The Spot

12/06



P Senin (12/06/2023) Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung Hadiri Pembukaan Kejuaraan Internasional World Surf League (WSL) Kruis Pro Tahun 2023 di Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat.





Acara yang turut dimeriahkan dengan tari kolosal, pekan fest, hingga penampilan seni dan budaya Lampung di acara kelas internasional yang dihadiri ratusan turis mancanegara. World Surf League (WSL) QS 5000 (Krui Pro 2023) rencananya diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 18 Juni 2023. Kejuaraan surfing internasional tersebut diikuti oleh 293 peserta dari 14 negara antara lain Jepang, Brazil, Italia, Australia termasuk atlet surfing dari Indonesia dan atlet lokal Pesisir Barat. Acara pembukaan Krui Pro dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, staf ahli manajemen

bidang krisis Padjar Utomo selaku perwakilan Kementerian Pariwisata, dan Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika.

Rombongan gubernur diarak menggunakan alam gemiser dan tarian pincak silat menuju lokasi pembukaan Krui Pro di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, Lampung. Event World Surf League (WSL) Krui Pro Tahun 2023 ini resmi dibuka oleh gubernur beserta tamu VIP bersama-sama membuka acara Krui Pro secara simbolis dengan menabuh alat cetik.

Dalam kesempatan event tahunan internasional ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Lampung melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, dalam rangka menyambut dan mendukung pelaksanaan Event Internasional tersebut, imigrasi kotabumi juga memberi "layanan on the spot" kepada para atlet internasional, para official tim, para pendukung tim dengan membuka Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) terhitung tanggal 12-18 Juni 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan WSL Krui Pro 2023 QS5000 pada tahun 2023.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Bupati Kab. Pesisir Barat, Agus Istiqlal, dan



◀ Pembukaan event WSL krui Pro yang dihadiri ratusan turis mancanegara.

”

Apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran imigrasi Kotabumi yang telah memberikan kemudahan pada para atlet, official tim dan pendukung untuk memperpanjang layanan izin tinggal keimigrasian WNA dengan membuka layanan Izin Tinggal Keimigrasian “on the spot” ditempat acara perlombaan berlangsung.

Pandu Sjahrir ➤

Persatuan Selancar Ombak Indonesia



World Surf League (WSL) QS 5000 (Kruai Pro 2023) diikuti oleh 293 peserta dari 14 negara ▲

Ketua PSOI (Persatuan Selancar Ombak Indonesia), Pandu Sjahrir turut meninjau both layanan keimigrasian yang tidak jauh dari lokasi perlombaan serta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran imigrasi Kotabumi yang telah memberikan kemudahan pada para atlet, official tim dan pendukung untuk memperpanjang layanan izin tinggal keimigrasian WNA dengan membuka layanan Izin Tinggal Keimigrasian “on the spot” ditempat acara perlombaan berlangsung.

Turut hadir juga pada kegiatan Pembukaan ini Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mirza Akbar; Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Imam Setiawan dan Fungsional Pada Divisi Keimigrasian Kanwil Lampung.

Operasi Gabungan

Memimpin langsung Operasi Gabungan dengan target operasi yang terletak di daerah Wisata Kruai, Kadivim Teo menyampaikan agar menghindari hal-hal yang berdampak tidak baik ke depannya dan beliau menyampaikan agar selalu tertib dalam melaksanakan operasi.

Turut hadir mendampingi Kadiv Keimigrasian yaitu Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Mirza Akbar. Tim Gabungan yang terdiri atas Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Lampung dan Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Lampung memonitoring kegiatan dan keberadaan orang asing dan melakukan pengecekan perizinan keimigrasiannya. Wilayah ini dipilih karena menjadi

tujuan destinasi olahraga surfing wisatawan asing dari mancanegara serta bertepatan dengan pelaksanaan event dunia yaitu World Surf League KRUI PRO 2023. Untuk itu, kegiatan orang asing yang berada di wilayah Kruai, Kabupaten Pesisir Barat perlu diawasi.

Target sasaran yang dituju merupakan penginapan, hotel dan cottage yang tersebar di wilayah Kruai, Kabupaten Pesisir Barat. Kegiatan pengawasan ini meliputi pemeriksaan Paspor, KITAS, KITAP, surat kepemilikan penginapan, hotel, dan cottage maupun wajib pajak yang harus diselesaikan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak ada kendala berarti karena sikap kooperatif dari Warga Negara Asing yang menerima kedatangan Tim. •



Operasi gabungan pengawasan orang asing merupakan tugas dan tanggungjawab bersama dari semua unsur instansi, kerja sama dan koordinasi yang baik dapat menanggulangi potensi kerawanan keberadaan kegiatan orang asing di Indonesia. Diharapkan komitmen yang dibangun bersama ini dapat ditingkatkan terus menerus untuk kedepannya guna menjaga keutuhan bangsa.

Teodorus Simarmata ➤
Kepala Divisi Keimigrasian



WORKSHOP PENYELESAIAN SUBSTANTIF PATEN PENGELOLAAN PASCA PENDAFTARAN

dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku
Usaha di Kantor Wilayah Kumham Lampung,
Ditjen KI Terbitkan 6 Sertifikat Paten

06/06



▲
Kakanwil Sorta serahkan Sertifikat Paten yang
diajukan oleh Perguruan Tinggi



Selasa (06/06), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan Workshop Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca Pendaftaran Dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen pemohon paten yang sudah tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan 5-9 Juni 2023 pada 9 Provinsi di Indonesia salah satunya Provinsi Lampung.

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Lampung, Dr. Sorta Delima L Tobing didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha; Kepala Divisi Administrasi, M. Ikmal Idrus; Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yulinar Trisia; dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara.



Perguruan Tinggi telah banyak menghasilkan karya Intelektual yang mestinya perlu mendapat perlindungan Hukum, misalnya melalui pendaftaran paten, yang pada akhirnya diharapkan ada komersialisasi.

Sorta Delima Lumban Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung



▲
 Hadir secara langsung di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung
 Pejabat Fungsional Pemeriksa Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Hadir Pejabat Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Utama, Endang Yulianan; Para Pemeriksa Paten Ahli Madya di Lingkungan Direktorat Paten, DTSLT dan Rahasia Dagang; Koordinator Permohonan dan Publikasi, Slamet Riyadi; dan Sub Koordinator Sertifikasi, Hermawan Saputro.

Diawali penyampaian laporan kegiatan oleh Slamet Riyadi selaku Koordinator Permohonan dan Publikasi Ditjen Kekayaan Intelektual. Selanjutnya kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Dr. Sorta Delima L Tobing. Dalam sambutannya, Sorta menyampaikan





bahwa peran Kekayaan Intelektual menjadi kebutuhan primer dan urgen, sehingga semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum pelajar, mahasiswa, hingga pegiat ekonomi perlu mengetahui pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual. Manfaat pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dapat diperoleh adalah mendatangkan manfaat ekonomi bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual, serta mencegah terjadinya klaim oleh pihak lain.

“Pada intinya, kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil kreatifitas intelektual.”

ucap Sorta. Lebih lanjut, Sorta menyampaikan bahwa Perguruan Tinggi telah banyak menghasilkan karya Intelektual yang mestinya perlu mendapat perlindungan Hukum, misalnya melalui pendaftaran paten, yang pada akhirnya diharapkan ada komersialisasi.

“Diharapkan dengan adanya Komersialisasi terhadap Paten akan berdampak pada

munculnya Inovasi-inovasi yang makin kompetitif sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional.” kata Sorta.

Tidak hanya Perguruan Tinggi, Sorta juga mendorong Lembaga Penelitian dan Pengembangan maupun Pelaku Usaha di Provinsi Lampung untuk segera mendaftarkan Permohonan Paten. •



Diharapkan dengan adanya Komersialisasi terhadap Paten akan berdampak pada munculnya Inovasi-inovasi yang makin kompetitif sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional

Sorta Delima Lumban Tobing ➤
Kakanwil Kemenkumham Lampung

SOSIALISASI KEBIJAKAN TERKAIT PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP)

06/06



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar Sosialisasi Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di Ballroom Hotel Horison (25/05).

Kegiatan yang dihadiri oleh 100 Orang ini terdiri dari Unsur Notaris, Media Online, Narasumber secara daring Ida Mahmida, Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum yang membawakan materi terkait Dasar Kebijakan Pelaksanaan dan Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dan hadir secara langsung M. Reza Berawi (Notaris Bandar Lampung) membawakan materi terkait Teknis Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Korporasi serta Zainudin Hasan (Akademisi Fakultas

”

kebijakan penerapan prinsip Pemilik Manfaat dari Korporasi ini adalah untuk melindungi kepentingan dari korporasi itu sendiri, melindungi notaris sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemiliki manfaat korporasi, dan tentu saja sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme

Alpius Sarumaha ➤

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Hukum Universitas Lampung) membawakan materi terkait Latar Belakang dan Urgensi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Terorisme (Tipiter).

Dalam Laporan Panitia Penyelenggara, dibacakan Maksud dan Tujuan kegiatan diselenggarakan kegiatan ini yaitu untuk sarana diskusi mengenai pelaksanaan serta memberikan Solusi mengenai permasalahan Pengisian Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) pada Korporasi.

Kegiatan di Buka dengan sambutan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Dr. Alpius Sarumaha. Dalam sambutannya Alpius menjelaskan bahwa Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pada Pasal 3 menegaskan bahwa setiap korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari korporasi dengan jumlah paling sedikit merupakan 1 (satu) personil dengan kriteria yang disesuaikan dengan bentuk korporasi.

"Pasal 14 disebutkan bahwa korporasi wajib menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat



◀ Notaris Bandar Lampung, M. Reza Berawi membawakan materi terkait Teknis Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Korporasi



▶ Zainudin Hasan (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung) membawakan materi terkait Latar Belakang dan Urgensi Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Upaya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Terorisme (Tipiter).



◀ Ida Mahmida narasumber dari Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum membawakan materi terkait Dasar Kebijakan Pelaksanaan dan Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

dari Korporasi, yang meliputi identifikasi Pemilik Manfaat; dan verifikasi Pemilik Manfaat. Korporasi juga wajib menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum." Ujar Alpius dalam sambutannya.

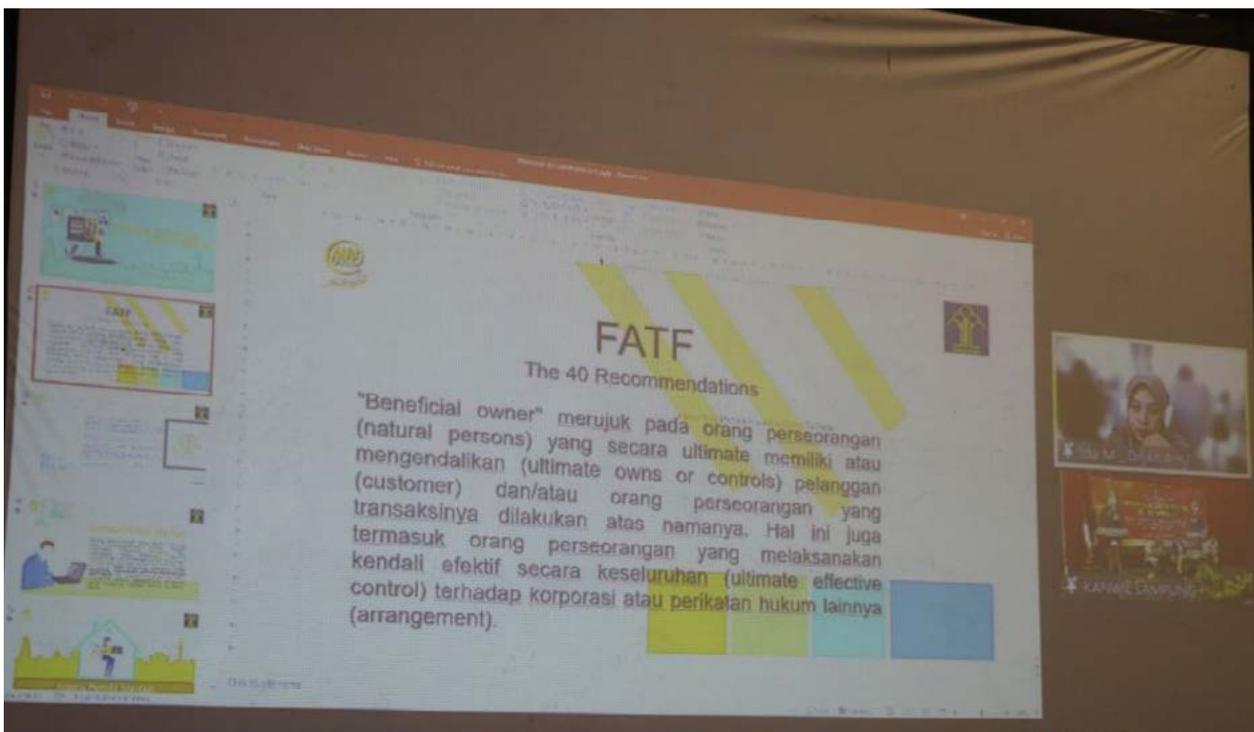
Lebih lanjut Alpius menekankan bahwa kebijakan penerapan prinsip Pemilik

Manfaat dari Korporasi ini adalah untuk melindungi kepentingan dari korporasi itu sendiri, melindungi notaris sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemiliki manfaat korporasi, dan tentu saja sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Menutup sambutannya Kadivyanakumham berharap Melalui Sosialisasi Kebijakan terkait Pemilik Manfaat (Beneficial

Ownership) kepada Korporasi di Wilayah, dapat meningkatkan pemahaman dan kewajiban khususnya bagi notaris untuk menerapkan PMPJ dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan kepedulian masyarakat pada umum mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme.

Kegiatan dilanjutkan pemberian materi oleh narasumber dan tanya jawab dengan Audiens yang hadir secara langsung. •



Ida Mahmida menjelaskan tentang rekomendasi Financial Action Task Force (FATF)



OPTIMALISASI PENANGANAN OVERSTAYING DAN OVERLOAD BASAN BARAN PADA UPT PEMASYARAKATAN

Kanwil Lampung Gelar
Rakor Dilkumjakpol Tahun 2023

04/05





Bangun sinergitas aparat penegak hukum, Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung buka rapat koordinasi Dilkumjakpol tahun 2023. Kamis, (04/05/2023).

Bertempat di aula Kantor Wilayah, rakor Dilkumjakpol sendiri adalah forum yang mempertemukan para aparat penegak hukum yaitu Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah Lampung yang bertujuan mensinergikan aparat penegak hukum melalui harmonisasi dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana yang lebih bersifat teknis operasional dalam menyelesaikan masalah yang di bahas dalam Rapat Koordinasi Dilkumjakpol

dengan tema “membangun sinergitas aparat penegak hukum dalam rangka optimalisasi penanganan overstaying tahanan dan overload basan baran pada upt pemasarakatan wilayah lampung”.

Hadir dalam Rakor, Kepala Divisi Pemasarakatan Farid Junaedi; Kepala Divisi Administrasi, M.Ikmal Idrus; Kepala Divisi Imigrasi, Teodorus Simarmata; seluruh KaUPT Jajaran Kemenkumham Lampung serta 4 Narasumber yaitu Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung Subari Kurniawan; Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung Abdul Siboro; Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polresta Bandar Lampung Muhammad Iqbal dan Hakim Pengadilan Negeri 1A Bandar Lampung.

Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Tahun 2023, Farid Junaedi menyampaikan laporan terkait permasalahan yang akan di bahas dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Dilkumjakpol yang salah satunya adalah Lambatnya proses administrasi mengenai surat perpanjangan penahanan dari pihak yang menahan sehingga menyebabkan munculnya overstaying di lapas/rutan, Restoratif justice secara terpadu dalam penanganan Perkara Pidana pada sistem Peradilan Pidana belum maksimal di laksanakan sesuai yang di amanatkan pada (UU SPPA) No.11 tahun 2012 dan belum adanya kesamaan tentang teknis penerapan restorative Justice.

”

Lambatnya proses administrasi mengenai surat perpanjangan penahanan dari pihak yang menahan sehingga menyebabkan munculnya overstaying di lapas/rutan, Restoratif justice secara terpadu dalam penanganan Perkara Pidana pada sistem Peradilan Pidana belum maksimal di laksanakan sesuai yang di amanatkan pada (UU SPPA) No.11 tahun 2012 dan belum adanya kesamaan tentang teknis penerapan restorative Justice.

Farid Junaedi ➤
Kepala Divisi Pemasyarakatan





Sesi diskusi Rapat Koordinasi Dilkumjakpol usai narasumber memberikan pemaparan

Selain untuk sinergitas aparat penegak hukum, tujuan kegiatan ini juga untuk melakukan evaluasi terhadap upaya optimalisasi penanganan overstaying tahanan dan overload basan baran pada upt masyarakatan wilayah lampung yang telah dilakukan serta mencari solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi.

Abdul Siboro memaparkan materi terkait Pemberlakuan Restorative Justice (RJ) Dalam Tahapan mengurangi Over Crowding atau Over Capacity pada Lapas/Rutan di Wilayah Lampung. Restorative Justice merupakan pergeseran pemidanaan yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana yang diusahakan

tidak harus masuk lapas , tapi diupayakan dengan jalan tengah berdamai.

Setelahnya Pemaparan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal, Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang menjelaskan tentang Upaya yang dilakukan Polresta Bandar Lampung dalam menangani

barang bukti dan Hambatan yang dihadapi dalam penanganan barang sitaan.

Kemudian pemateri ketiga Subari Kurniawan, Koordinator Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Lampung memaparkan tentang tata Kelola benda sitaan, barang bukti, barang rampasan dan penyelesaian barang rampasan. "Kejaksaan mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap benda

sitaan serta merupakan poros dan filter antara penyidikan dan penuntutan juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" Ujar Subari.

Terakhir, pemaparan materi di sampaikan Hendro Wicaksono Hakim Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang. terkait Aplikasi e-BERPADU (elektronik Berkas Pidana Terpadu adalah

integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan perpanjangan penahanan pelimpahan berkas elektronik permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus ke pengadilan. Lalu kegiatan ditutup dengan Diskusi / Tanya Jawab dengan peserta. •



◀ Hakim Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang, Hendro Wicaksono. terkait Aplikasi e-BERPADU (elektronik Berkas Pidana Terpadu)



Seluruh Kepala UPT Pemasarakatan turut berpartisipasi dalam Rakor Dilkumjakpol ▶



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH LAMPUNG

Resolusi Kemenkumham Tahun 2023



Wujudkan
Kementerian
Hukum dan HAM
Semakin PASTI
dan **BerAKHLAK**

dengan bekerja secara
cepat, tepat, ikhlas
dan hasilnya
akuntabel

Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI



03/04



Penguatan Pengamanan Oleh Kadivpas Lampung Kepada Jajaran Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung

Farid Junaedi menyampaikan agar jajaran pengamanan selalu menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap bidang tugas khususnya hal keamanan dan ketertiban. Mengayomi, membina dan memberi nasihat adalah salah satu tugas utama petugas Lapas. Petugas Lapas harus selalu mengutamakan keamanan dan memposisikan pada hal yang baik karena petugas Lapas harus memberi pengaruh pada WBP.

05/04



Evaluasi Perjanjian Kerjasama Pemda Kabupaten Pesisir Barat dan Kantor Imigrasi Kota Bumi

Kadiv Keimigrasian, Teodorus Simarmata berharap tim perancang dapat mengakomodasi hak dan kewajiban yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Kotabumi agar selanjutnya dapat diadakan rapat lanjutan kesiapan pemda yang disaksikan Kepala Kantor Wilayah dan Bupati Pesisir Barat. Beberapa hal menjadi perhatian khusus Kepala Divisi Keimigrasian terkait hak dan kewajiban Pemda terkait sarana dan prasarana yang ada di UKK Krui.

08/05



Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan, Kakanwil Sorta : Teruslah Beradaptasi dengan Perubahan Tugas Masing-Masing

Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Dr. Sorta Delima Lumban Tobing lantik 3 Orang Pejabat Struktural dan 2 Orang Pejabat Fungsional di Lingkungan dan Jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.

26/05



Sosialisasi Merek Kolektif, Tingkatkan Potensi Produk Yang Inovatif dan Kreatif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar kegiatan Sosialisasi Merek Kolektif dalam rangka menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal dan sumber daya yang bersifat unik khas di Provinsi Lampung, bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi.

12/06



Koordinasi Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Kota Agung Tanggamus

Mendukung program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu “Menjadikan Kekayaan Intelektual Sebagai Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Pendorong Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Budaya”. Kanwil Kemenkumham Lampung, melakukan salah satu Kegiatan yang mendukung program yaitu Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual pada Kabupaten Tanggamus

13/06



Raih Kinerja Terbaik, Kanwil Kemenkumham Lampung Terima Penghargaan dari DJPb

Penyerahan Penghargaan ini diberikan bagi Satuan Kerja K/L terbaik dalam kinerja penyampain Laporan Keuangan serta sebagai apresia atas kerja keras dalam menyelesaikan seluruh permasalahan pada penyusunan Laporan Keuangan (LK) tingkat UAPPA-W TA 2022. Kanwil Kemenkumham Lampung mendapat predikat terbaik I (Ditjen Imigrasi) Kategori Pagu Kecil dan Peringkat II (Ditjen Pemasarakatan) Kategori Pagu Besar

21/06



Bimbingan Teknis Unit Pemberantasan Gratifikasi dan Pungli

Plh Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, M.Ikmal Idrus dengan mengatasnamakan organisasi, menaruh harapan dan kepercayaan penuh kepada seluruh UPT untuk dapat terbangun Budaya Anti Korupsi dan integritas yang tinggi pada masing-masing satuan kerjanya dengan merangkul seluruh jajaran tanpa terkecuali sehingga tujuan negara dalam penegakan hukum pidana serta pemberantasan kasus korupsi yang merupakan kejahatan Extra Ordinary Crime dapat tercapai.

30/06



Kanwil Kemenkumham Lampung Bagi 300 Bingkisan Daging Kurban

Idul Adha 1444H, Kanwil Kemenkumham Lampung melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 3 ekor Sapi dan 1 ekor Kambing. Kegiatan Penyembelihan ini dilaksanakan seluruh Panitia Pelaksana Kurban Tahun 2023M / 1444H serta Seluruh Pegawai di Kanwil Kemenkumham Lampung. 300 bingkisan daging kurban ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dilingkungan sekitar Kantor



Mau Nonton Konser di Luar Negeri?

Apa saja yang harus disiapkan?

Daripada maksain beli tiket konser dari calo dengan harga selangit, mungkin nonton konser di luar negeri bisa jadi alternatif buat kamu. Apa saja yang harus dipersiapkan ya?

pelajari lebih lanjut! >

Paspor

Jika melakukan perjalanan ke luar negeri tentu kamu harus punya paspor. Apabila diibaratkan, paspor adalah Kartu Tanda Pengenal saat kita sedang berada di luar negeri.

Di dalam paspor umumnya mencantumkan data pribadi pemilik, seperti nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Paspor milik orang Indonesia dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Visa

Yang Kedua kamu harus membuat visa. Visa adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemerintah negara tujuan sudah menyetujui kedatanganmu ke negara mereka. Dengan kata lain, kedatanganmu ke negara tersebut melalui jalur yang legal.

Tanpa adanya visa, kamu akan dianggap sebagai teroris atau bahkan imigran gelap dan akan dideportasi paksa kembali ke negara asal. Visa diberikan oleh Kedutaan Besar dari negara tujuan.



Perbedaan Visa dengan Paspor



Paspor umumnya berupa buku saku yang memuat berbagai macam informasi yang menandakan bahwa kamu merupakan warga negara Indonesia atau negara lain. Sedangkan, visa memiliki bentuk stiker dengan hologram khusus yang ditujukan untuk menghindari pemalsuan. Stiker visa ini biasanya ditempelkan pada lembar di dalam paspor.

Ada juga beberapa negara yang menggunakan bentuk visa tradisional yaitu berupa stempel. Selain itu juga ada visa digital atau visa online. Visa digital ini umumnya dikirimkan melalui e-mail dan berupa soft file. Pemohon visa harus mencetak visa digital tersebut untuk kemudian ditempelkan pada lembar paspor.



Membuat Paspor di Kantor Imigrasi

Kamu dapat membuat paspor di Kantor Imigrasi terdekat. Syarat pembuatannya sebagai berikut:

1. yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri
2. Kartu keluarga (KK)
3. Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis*
4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang

**Nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua harus tercantum dalam dokumen. Jika tidak, Anda dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.*



Prosedur

Lakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui App Store atau Google Play. Permohonan manual dapat Anda lakukan dengan cara berikut.

1. Isi data di aplikasi yang disediakan pada loket permohonan dan lampirkan dokumen kelengkapan persyaratan.
2. Tunggu Pejabat Imigrasi memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan.
3. Dapatkan tanda terima permohonan dan kode pembayaran dari Pejabat Imigrasi setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
4. Jika dokumen persyaratan dinyatakan belum lengkap, terima dokumen permohonan yang dikembalikan Pejabat Imigrasi. Permohonan dianggap ditarik kembali.

Mekanisme Penerbitan

1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan
2. Pembayaran biaya paspor
3. Pengambilan foto dan sidik jari
4. Wawancara
5. Verifikasi
6. Adjudikasi



Kantor Imigrasi di Prov. Lampung

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

 Jl. Hj. Haniah No.3, Gulak Galik, Tlk. Betung Utara, Bandar Lampung

2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

 Jl. Tjoekoel Soebroto No.75, Kotabumi Selatan, Lampung Utara

2. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda

 Jl. Raden Intan, Agom, Kalianda, Lampung Selatan



Tiket konser, pesawat, dan hotel sudah dapat, paspor dan visa sudah dibuat. Nikmati perjalanan dan konsermu dengan riang. Jangan lupa hati-hati di jalan .



Kamu Harus Tahu



Pemegang Paspor Indonesia Bisa Kemana Aja?

44 Negara Bebas Visa

Bagi Pemegang Paspor Indonesia

1. Barbados 
2. Belarusia 
3. Bermuda 
4. Brasil 
5. Brunei 
6. Kamboja 
7. Chili 
8. Kolumbia 
9. Kepulauan Cook 
10. Dominika 



11. Ekuador 
12. Fiji 
13. Gabon 
14. Guyana 
15. Haiti 
16. Hongkong 
17. Jepang 
18. Kazakhstan 
19. Laos 
20. Makau 
21. Malaysia 
22. Mali 
23. Mikronesia 
24. Maroko 
25. Mozambik 
26. Myanmar 
27. Namibia 
28. Niue 
29. Oman 
30. Pakistan 
31. Peru 
32. Filipina 
33. Qatar 

34. Rwanda 
35. Serbia 
36. Singapura 
37. Sri Lanka 
38. Saint Vincent & Grenadines 
39. Suriname 
40. Tajikistan 
41. Thailand 
42. Gambia 
43. Uzbekistan 
44. Vietnam 

Di atas adalah daftar negara bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia.

Namun, perlu diperhatikan bahwa durasi tinggal dan tujuan perjalanan yang diizinkan untuk pemegang paspor Indonesia di setiap negara bergantung pada regulasi visa negara tersebut.

Pemegang paspor Indonesia tetap membutuhkan visa untuk masa tinggal yang melebihi durasi tinggal yang diizinkan atau untuk tujuan yang tidak termasuk dalam Kebijakan Pembebasan Visa dari negara destinasi tersebut.





Kekayaan Intelektual dalam Olahraga Badminton

Yuk kita kenali jenis kekayaan intelektual dalam olahraga yang menyumbangkan lima medali emas dalam ajang Sea Games 2023 kemarin.

[pelajari lebih lanjut! >](#)



Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Contoh merek terkenal dalam industri badminton adalah Yonex, Victor, atau Li-Ning.

Hak Cipta

Hak cipta meliputi karya-karya kreatif dalam bentuk tertulis, visual, atau audio. Termasuk buku, artikel, panduan pelatihan, video latihan, atau rekaman pertandingan yang terkait dengan badminton.



Paten

Paten adalah hak eksklusif penemu atas temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu. Ini bisa termasuk pengembangan baru dalam desain raket, bahan yang digunakan dalam shuttlecock, atau teknologi sensor yang terintegrasi dengan lapangan badminton.

Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Contohnya seperti desain raket atau desain shuttlecock.



Pelindungan Kekayaan Intelektual

daftar dan catatkan melalui website: dgip.go.id
Atau jika sekelik perlu pendampingan pelayanan kekayaan intelektual, kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

 Jl. RW. Monginsidi No.184, Bandar Lampung

 08.00-16.00

 0812710087398



Hidup ini kesempatan dan akan berlalu tidak dapat dikembalikan, maka pergunakan waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Selagi ada kesempatan mari pikirkan, inginkan dan katakan serta lakukan yang baik, benar, berguna dan membangun.

Setiap perkataan dan perbuatan kepada siapapun akan membawa akibat dan balasan untuk diri kita sendiri, bila ditabur kebaikan maka kebaikan juga yang akan kita tuai di suatu saat yang tepat.

”

- Sorta Delima Lumban Tobing -



7 KARAKTER PRIBADI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN ORGANISASI

1. Bekerja dan berkarya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT dan rakyat
2. Meyakini selalu diawasi Allah SWT dan menyadari bahwa jika berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan dan berbuat buruk pasti dibalas keburukan
3. Semangat belajar tiada akhir dan menciptakan beragam inovasi untuk kemudahan layanan
4. Hidup sederhana dengan *take home pay* yang halal
5. Mengeliminasi keserakahan terhadap kekuasaan dan harta
6. Merespon semua keberhasilan dengan syukur dan rendah hati
7. Menyikapi kegagalan dengan berfikir positif tentang hikmah sembari mencari solusi tepat



RAZILU

INSPEKTUR JENDERAL KEMENKUMHAM RI

TOLAK GRATIFIKASI

DALAM BENTUK APAPUN



ATAU LAPORKAN KE
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PUSAT
KEMENKUMHAM



upg.kemenkumham.go.id



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SEMAKIN
PASTI

REFORMASI
HUKUM



PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA